

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang pada umumnya, terfokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. (Sukirno 2006).

Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dimana sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik

secara lokal (daerah). Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut. (Todaro,1998).

Dua belas tahun Indonesia menghadapi perubahan kondisi pembangunan secara keseluruhan. Pemerintahan dan pembangunan diseluruh Indonesia sudah memasuki otonomi daerah yang memiliki hakikat bahwa pengelolaan pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah yang selama ini cenderung seragam mulai berubah dan bervariasi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan.

Proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Tujuan pokok pembangunan ekonomi menurut Jhingan (2000) ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan berbagai fasilitas infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar

yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia. Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau di sebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain di bidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut . (Arsyad 1999 : 108).

John Glasson (1990) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat karena

di setiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Kaum klasik berpandangan bahwa daerah yang memiliki atau kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin SDA. Perbedaan SDA tersebut merupakan modal awal dalam pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain mengandalkan SDA yang ada dibutuhkan juga sinergi dengan faktor-faktor lain seperti SDM yang mengelola SDA, teknologi sebagai alat “tools” untuk mengelola SDA. Sehingga akan dihasilkan barang dan jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya berdampak pada pendapatan daerah tersebut. Seketika terjadi *multiplier effect* dalam kegiatan perekonomian dan perputaran uang akan terjadi.

Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini berpenduduk 59.330 jiwa pada tahun 2019.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan mengembangkan produk unggulan, maka eksistensi suatu wilayah akan tetap terjamin. Oleh karena itu identifikasi dan analisis sektor ekonomi potensial menjadi hal penting bagi setiap kabupaten. Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yang mempunyai

potensi wilayah, kondisi geografis maupun potensi khas lain yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Pada Tabel 1 di bawah memperlihatkan bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulau Taliabu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pulau Taliabu
Menurut Lapangan Usaha 2010 (Miliar Rupiah)

NO	JENIS LAPANGAN USAHA	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	470.66	490.95	509.94	524.38	537.64	547.15
2	Pertambangan dan Penggalian	1.53	1.56	1.58	57.30	102.41	100.88
3	Industri Pengolahan	21.18	21.78	21.92	22.10	22.16	18.96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.20	0.23	0.24	0.25	0.28	0.28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.10
6	Konstruksi	22.34	24.56	27.20	29.15	35.15	36.90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	115.17	126.17	138.44	154.15	163.78	162.07
8	Transportasi dan Pergudangan	8.93	9.65	10.14	11.11	11.66	11.71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.68	0.76	0.77	0.82	0.85	0.81
10	Informasi dan Komunikasi	5.27	5.76	6.30	6.67	7.27	7.63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.62	4.04	4.20	4.38	4.73	5.09
12	Real Estate	0.46	0.50	0.52	0.52	0.54	0.53
13	Jasa Perusahaan	0.26	0.28	0.30	0.31	0.32	0.32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	54.73	58.52	63.70	70.00	79.05	83.23
15	Jasa Pendidikan	13.53	14.51	14.58	14.65	14.79	15.04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.82	6.30	6.92	7.58	8.31	8.90
17	Jasa lainnya	2.10	2.25	2.43	2.59	2.63	2.56
Produk Domestik Regional Bruto		726.53	767.88	808.59	906.04	991.63	1,002.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Pulau Taliabu 2021

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut (Sjafrizal, 2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam komponen Produk Domestik Regional Bruto adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan

perdagangan, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, sector informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sector pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa-jasa lainnya (BPS Kabupaten Pulau Taliabu Tahun (2015-2020).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sektor ekonomi manakah sebagai sektor basis dan non basis dalam perekonomian daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode pengamatan ?
2. Sektor ekonomi manakah sebagai sektor ekonomi prima, berkembang, potensial, dan terbelakang dalam perekonomian daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode pengamatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi mana yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode pengamatan.
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi mana sebagai sektor ekonomi prima, berkembang, potensial, dan terbelakang dalam perekonomian daerah Kabupaten Pulau Taliabu selama periode pengamatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai Analisis Potensi Perekonomian Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan

referensi di lingkungan akademisi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan seperti berikut ini :

1. Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada didalam daerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan menjadi sumber dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat.
2. Pulau taliabu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yang di sahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program S1 (Strata-1) dan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

b. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang kinerja masing-masing sektor.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk dapat dikaji lebih lanjut.